

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

ketidakseimbangan yang terjadi antar lapisan penduduk menengah kebawah disebut masyarakat miskin, hakekatnya bersumber dari sebuah masalah yang kecil. Oleh karena itu, setiap pemberontakan yang meningkatkan ambang batas sosial dapat dilampaui oleh pemberontakan yang menyelesaikan atau meningkatkan masalah kemiskinan yang mendasarinya. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa konsep kemiskinan bukanlah sesuatu yang harus dibicarakan berdasarkan peristiwa-peristiwa terkini (seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli neo-klasik), melainkan sesuatu yang harus dibicarakan dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang akan datang (ekonomi, sosial – budaya dan politik). Dengan demikian, setiap kebijakan yang mengisyaratkan bahwa kemiskinan merupakan penyebab serangan jangka panjang (langsung) merupakan strategi yang sah yang menuntut perlindungan, baik dalam tataran diskusi akademik maupun dalam konteks kebijakan praktis yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat umum dan untuk mengatasi masalah lapisan tipis yang terus-menerus.

Belakangan ini perbincangan masalah kemiskinan muncul kembali dan menjadi topik yang hangat untuk di bicarakan dikalangan para akademisi, serta pengambil kebijakan dan maupun di para aktivis masyarakat. Kemiskinan tidak lagi masalah baru karena sekitar satu dasawarsa lalu masalah ini telah diskusikan di tingkat nasional, internasional dan juga berbagai kebijakan telah diupayakan

agar dapat mengatasi persoalan tersebut. Setiap upaya telah dilakukan untuk mengangkat kembali masalah kemiskinan dan itu merupakan langkah positif, karena berarti kita secara sadar mewaspadai bahwa proses pembangunan masih menyisakan sejumlah lubang persoalan yang perlu ditambun dalam usaha ataupun upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan social bagi seluruh lapisan masyarakat agar kiranya masyarakat miskin dapat merasakan kesejahteraan tersebut.

Ke depan, jelas masyarakat secara keseluruhan akan mengalami beberapa perubahan sebagai akibat dari permasalahan yang sebelumnya dihadapi selama proses pembangunan. Hal ini merupakan hasil dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Satu-satunya hal yang tidak mungkin diabaikan adalah kenyataan bahwa program pembangunan nasional akan semakin erat kaitannya dengan pertumbuhan internasional.

Menurut Para Ahli, kemiskinan itu cukup beragam. Dimana kebutuhan manusia yang bermacam-macam, tentu kemiskinan itu banyak sekali macamnya. Menurut definisi standar, komponen kunci kemiskinan adalah aspek tahap pertama, yang terdiri dari miskin akan asset karena tidak memiliki asset yang berharga sehingga dengan begitu tidak dapat diolah menjadi suatu bahan ataupun yang dapat menghasilkan uang agar kiranya bisa menjadi suatu keuntungan yang berharga dengan begitu dapat mengentaskan atau mengurangi msikin terhadap masyarakat, serta organisasi sosial dan politik, pengetahuan, dan keterampilan, dan aspek tahap kedua, yang terdiri dari minimnya jaringan sosial, uang, dan keuangan, dan susahny akan mendapatkan informasi. Dimensi - dimensi kemiskinan rendah dalam hal ini termanifestasikan dalam bentuk kurangnya gizi

yang diperoleh oleh orang miskin, kesehatan, perumahan, serta juga tingkat pendidikan yang kurang baik.

Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah adalah menentukan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan Pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan dengan niat serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan modal manusia, modal spiritual, modal teknologi, dan modal keuangan sambil membina keberlanjutan masyarakat dan lingkungan. Perencanaan Pembangunan merupakan suatu strategi untuk menyalurkan keadaan melalui refleksi dan inspirasi dalam rangka membangun kapasitas masyarakat (Capacity of society), sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah untuk mengurangi peningkatan angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan serius yang perlu segera ditangani karena berkaitan dengan kemanusiaan dan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai strategi Kemiskinan dan Program Kemiskinan, seperti Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Pangan Non Tunai.

Kemiskinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam rangka menegakkan harkat dan martabat kehidupan manusia di suatu wilayah tertentu. Prevalensi masalah kemiskinan bukanlah fenomena baru; melainkan selalu hadir dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Namun, yang membedakannya dengan masalah lainnya adalah jumlah orang yang berpartisipasi, distribusinya, ukurannya, kategorinya, dan penyebabnya. Secara

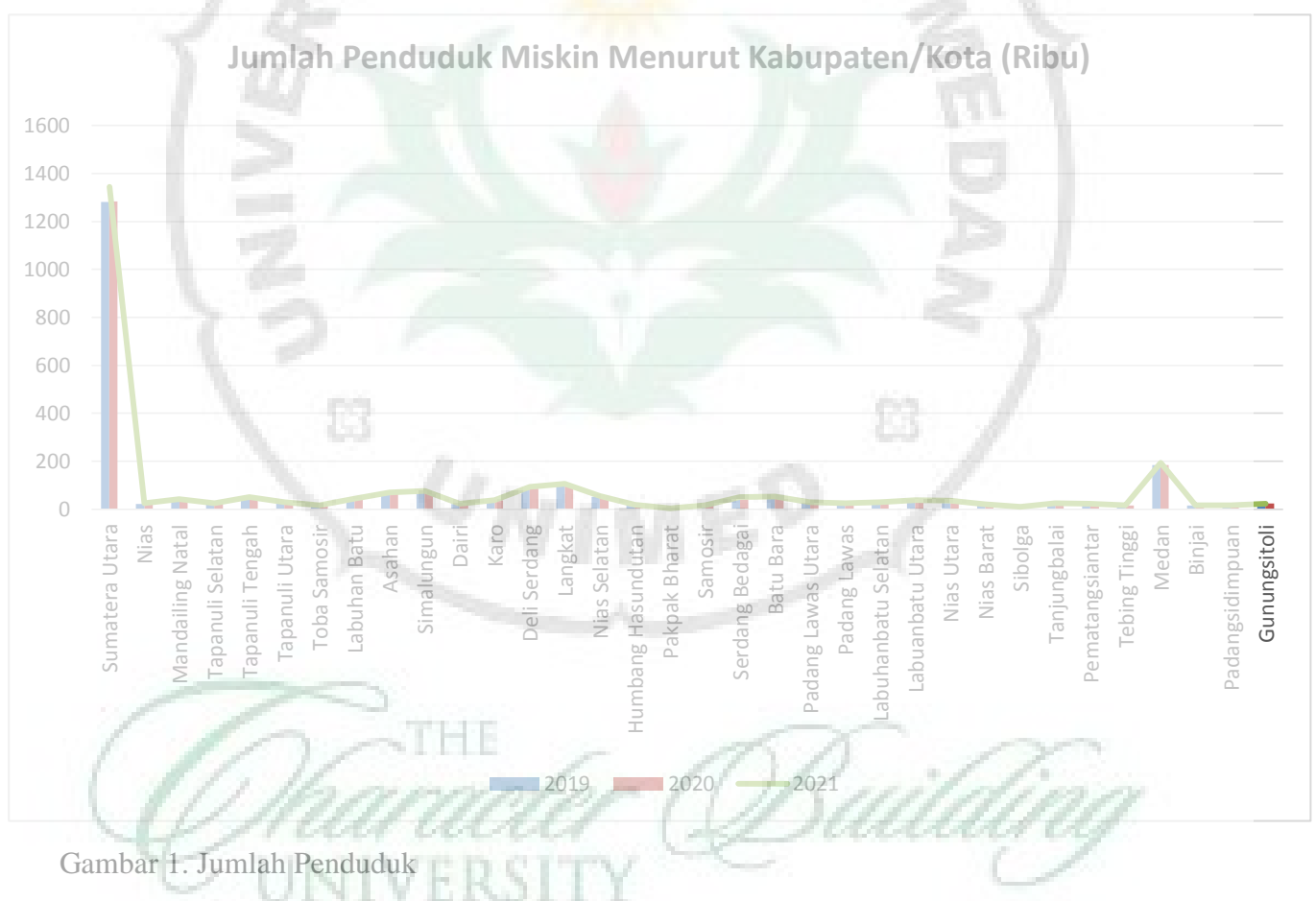
umum, lebih dikenal dengan banyaknya orang yang bekerja dengan orang miskin di negara berkembang ketimbang di negara maju, dan mayoritas dari mereka termasuk dalam kategori kemiskinan absolut. (Arsyad, 2014). Sebagian besar penduduk miskin di negara-negara berkembang bertempat tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama dari sektor pertanian (Karto & Koesoemo, 2014).

Namun di negara berkembang, dengan pendidikan yang rendah dalam hal ini merupakan satu-satunya penyebab masalah kemiskinan dalam perekonomian. Di Indonesia, perangkat kemiskinan meliputi yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, geografi, keseluruhan aset, dan modal sosial (Iswanto et al., 2013). Kemiskinan adalah satu-satunya masalah bangsa yang harus diselesaikan, dan merupakan penyumbang utama masalah sosial yang mempengaruhi masyarakat di Indonesia (Shofiyullah, 2015).

Perencanaan atau persiapan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan masalah kemiskinan adalah salah satu tujuan utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Sumatera Utara. Tujuan utama ini menopang program pemerintah dengan target menurunkan kemiskinan diberbagai wilayah, dimana dalam pembangunan tersebut akan dimulai dari berbagai macam bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin yang ada di Sumatera Utara. Dimana bantuan atau program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat dibagi dalam beberapa hal seperti Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Pangan Non Tunai, dan sebagainya.

Pemerintah seyogyanya mampu melihat kondisi perekonomian yang terjadi pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta bias melayani

kesehatan, pendidikan serta bantuan – bantuan yang elok. Dalam hal ini merupakan suatu pemicu atau solusi yang baik bagi kalangan masyarakat untuk beraktivitas dengan mendapatkan hasil yang baik. Serta dengan baiknya kualitas masyarakat baik kesehatan maupun pendidikan, pastinya perekonomian antara daerah tidak ada kesenjangan (Andini, 2013).



Gambar 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2019 berada pada titik atau berada dengan jumlah 1,2 Juta orang dengan itu terjadi permasalahan di Sumatera utara yang didasarkan dengan jumlah orang miskin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Maka ditahun 2020 sampai ditahun 2021 jumlah orang miskin yang ada di Sumatera Utara meningkat lagi

hampir mencapai sebesar 1,3 Juta orang, dengan terjadinya kenaikan seperti maka penulis turut ikut serta meneliti tentang jumlah orang miskin yang ada di Sumatera dan disini juga penulis tertarik menuliskan penelitian yang berjudul tentang kemiskinan.

Kebijakan pemerintah seperti program Indonesia Pintar, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan alat untuk menggeser angka kemiskinan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun angka kemiskinan yang telah menurun seperti gambar 1 diatas dan itu merupakan cita-cita dari pada pemerintah Sumatera Utara agar rakyat mendapatkan kesejahteraan secara terus menerus secara realistis.

Berdasarkan data jumlah kemiskinan yang ada di Sumatera Utara diatas hanya sedikit saja pergeseran atau pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maka perlu lebih bergiat lagi dalam menanggulangi ataupun mengurangi angka kemiskinan yang terdapat di Sumatera Utara agar penduduk kalangan ekonomi menengah ke bawah dapat sejahtera dengan program pemerintah melalui bantuan – bantuan yang disalurkan kepada masyarakat secara langsung.

Maka dengan terjadinya Angka kemiskinan yang belum turun secara signifikan ada di Sumatera Utara, dengan ini saya ingin mengangkat judul masalah tersebut agar kiranya dapat membantu permasalahan yang terjadi, sehingga dapat menurunkan jumlah orang miskin di Sumatera Utara. Dan Kebijakan ini harus dijalankan lebih bergiat lagi, agar kiranya orang miskin dapat melangsungkan kehidupan berumah tangga dengan tentram.

Bantuan pemerintah Program Indonesia Pintar atau PIP adalah hibah yang terdiri dari uang, serta syarat akses atau jalur, dan kesempatan bersekolah atau belajar dari pemerintah yang diberikan kepada siswa dan guru yang terhubung dengan masyarakat miskin untuk mendukung pendidikan. Dalam hal ini siswa diharapkan bisa melanjutkan sekolahnya agar dapat memiliki pengetahuan yang efisien dari sekolah tersebut, sehingga dengan begitu otomatis siswa dapat melakukan produktivitasnya dalam kehidupannya sehari-hari dan hal ini dapat mengurangi jumlah kemiskinan rumah tangga yang ada pada Sumatera Utara.

Dalam upayanya untuk menurunkan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan untuk mendorong siswa lain melakukan hal yang sama agar mereka bisa, BOS memiliki banyak kelebihan, seperti umpan balik positif, juga banyak kelemahan, seperti kelembaban. Sampai akhir semester sembilan tahun wajib belajar, mengikuti program akademik yang lebih ketat. Keberadaan Program Bantuan Operasional Sekolah telah membawa dampak positif, antara lain:

1. Tujuan utama haruslah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat melaksanakan wajib belajar sembilan tahun dengan baik.
2. Ketika siswa tidak mampu membayar biaya dan pajak yang dikenakan oleh sekolah, madrasah, dan pesantren, tidak mungkin seorang guru dapat menentukan apakah seorang siswa sedang menerima bantuan BOS saat ini.
3. Anak-anak yang bersekolah di SD perlu dipersiapkan untuk pindah ke SMP. Karena mahal biaya pendidikan, seharusnya tidak menjadi masalah bagi SD/MI/ sederajat untuk tidak dapat mencapai SMP/MTs/SMPLB.

4. Siswa yang berpotensi putus sekolah dan pindah ke SMP/MTs/SMPLB dicari dan diingatkan oleh kepala sekolah.

Demikian pula jika Anda menemukan mantan siswa yang telah menyatakan keinginan kuat untuk kembali ke sekolah. Namun, terlepas dari semua perkembangan positif tersebut, ada beberapa perkembangan negatif yang terkadang menjadi kendala atau masalah, terutama dalam prosedur pelaporan dan pencairan. Kelemahan yang paling menonjol adalah:

- 1) Ada persyaratan siswa miskin bersekolah di setiap sekolah, masjid, atau pondok pesantren yang menerima dana BOS, tetapi jenis pungutannya tidak disebutkan secara spesifik. Namun, dana yang disetujui pemerintah tersebut belum sepenuhnya menutupi seluruh biaya operasional sekolah.
- 2) Dalam hal terdapat ketentuan bagi pondok pesantren, masjid, atau sekolah yang menerima dana BOS tetapi tidak memiliki santri sejenis, maka dana tersebut digunakan untuk meringankan seluruh santri tersebut untuk mengurangi jumlah uang yang diterima. Dipinjamkan ke siswa yang berbeda. Akibatnya, kaum muda yang mampu melakukan penilaian akurat tetapi tidak memiliki target yang tepat menerima subsidi.
- 3) Fakta bahwa, berbeda dengan sekolah lain, lembaga pendidikan ini seringkali membutuhkan dana yang cukup besar untuk beroperasi karena lembaga pendidikan mendukung argumen bahwa dana BOS cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah.



- 4) Istilah "pendidikan gratis" mengacu pada sekolah swasta yang mendaftarkan sejumlah besar anak yang belum cukup umur untuk belajar sendiri. Premis dari pernyataan ini adalah bahwa sekolah negeri lebih mewakili sekolah swasta. (2006) Husein)

Pada bulan Juli 2005, pemerintah memulai program Bantuan Operasional Sekolah. Sebagian besar waktu, tujuan BOS adalah untuk mempermudah masyarakat menyelesaikan pendidikan sembilan tahun mereka. Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai tujuan khusus ini:1) dengan mempermudah semua siswa sekolah dasar berprestasi rendah, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk membayar operasional sekolah;2) dengan melepaskan semua siswa dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri, dengan pengecualian siswa dari sekolah internasional.SBI) dan sekolah percontohan bertaraf internasional (RSBI) dari membayar biaya pemeliharaan sekolah;3) menurunkan beban keuangan siswa yang bersekolah di sekolah swasta dengan mengurangi biaya operasional;Pada PP 48 tahun 2008, tujuannya dari dana BOS disebutkan. PP membagi biaya pendidikan menjadi tiga kategori: biaya yang dikeluarkan oleh non-karyawan, biaya karyawan, dan biaya bantuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan "Bantuan Pangan Non Tunai" (BPNT) adalah bantuan sosial pangan nontunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme rekening elektronik yang hanya digunakan untuk pembelian pangan dari penjual pangan atau "e-warong" yang bekerjasama dengan perbankan.

Pemerintah saat ini menyediakan sejumlah program terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa contohnya antara lain program penanggulangan kemiskinan berbasis donasi, program pemberdayaan usaha kecil, serta program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam RKP 2019, pemerintah telah mencantumkan lima prioritas nasional dan 24 acara prioritas yang direncanakan di tingkat proyek (satu unit dari tiga) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Lima prioritas nasional tersebut adalah: 1) Pembangunan manusia melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) peningkatan hubungan dan kelautan, pengurangan kesenjangan antar wilayah; 3) peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. pemanfaatan industri, pariwisata, pertanian, dan jasa produktif lainnya; 4) peningkatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air; dan 5) stabilitas ketahanan nasional dan keberhasilan pemilu (roll, 27 April).

Program lainnya termasuk mengarahkan sumbangan makanan non tunai untuk mengubah kebiasaan makan masyarakat, memperluas sumbangan sosial non tunai yang harus dilakukan tepat waktu, dan memberikan bantuan tunai kepada orang miskin untuk kegiatan padat karya. dan menawarkan pekerjaan sementara.. Desa-desa yang menderita malaise, kerawanan pangan, dan malaise pasca-konflik.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berikut permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sesuai dengan uraian rumusan masalah di atas:

1. Apa pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara?
2. Di Sumatera Utara, bagaimana pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah Pengentasan Kemiskinan?
3. Bagaimana kontribusi bantuan pangan nontunai terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui apakah Program Indonesia Pintar berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Bantuan Operasional Sekolah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui apakah Bantuan Pangan Non Tunai membantu pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah keuntungan melakukan penelitian yang dirasakan atau dibutuhkan:

### 1. Potensi Keuntungan:

#### a. Bagi peneliti,

Penelitian ini bermanfaat memperdalam dan mengaplikasikan teori yang diproeh, peneitian ini merupakan peatihan intelektual yang diharapkan

Dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan khususnya mengenai penerapan kemiskinan.

b. Bagi Pembaca:

Penelitian diharapkan bagi civitas akademika dapat menambah informasi atau sumbangan pemikiran dan bahan kajian penelitian tentang Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten tapanui tengah.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya. Dan menganalisis pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dipakai sebagai informasi bagi Pemerintah, hasil yang diperoleh mungkin bisa dipakai sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien yang terkait.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY